

Green Islamic Finance: Strategi Perbankan Syariah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau

¹Gigih Hadi Nugroho Said ²Hilalludin Hilalludin
¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, Indonesia
²Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia
Email: hadi23122050@gmail.com

Abstrak

Krisis lingkungan global mendorong lahirnya kebutuhan terhadap sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks tersebut, *Green Islamic Finance* muncul sebagai pendekatan yang mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi strategis perbankan syariah dalam mendukung ekonomi hijau, strategi implementasi *Green Islamic Finance*, peluang Indonesia sebagai pusat pengembangannya, serta tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis deskriptif terhadap berbagai literatur, regulasi, dan hasil penelitian terbaru terkait keuangan syariah dan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kesesuaian struktural dengan prinsip *green finance* karena berbasis sektor riil, pembagian risiko, dan nilai etika yang mendukung keberlanjutan. Implementasi *Green Islamic Finance* memerlukan restrukturisasi portofolio pembiayaan, inovasi produk hijau, serta penguatan operasional berbasis ESG. Indonesia juga memiliki peluang besar untuk menjadi pusat *Green Islamic Finance* karena didukung oleh pasar syariah yang luas, kebutuhan investasi hijau yang tinggi, serta dukungan regulasi yang semakin berkembang. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas industri, kesiapan sumber daya manusia, dan rendahnya literasi pasar terhadap pembiayaan berkelanjutan. Dengan demikian, *Green Islamic Finance* berpotensi menjadi model integratif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Green Islamic Finance*, perbankan syariah, ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, ESG

Abstract

Articles The global environmental crisis has increased the need for a financial system that supports not only profitability but also economic and environmental sustainability. In this context, *Green Islamic Finance* emerges as an approach that integrates Islamic financial principles with sustainable development. This study aims to analyze the strategic role of Islamic banking in supporting the green economy, the implementation strategies of *Green Islamic Finance*, Indonesia's opportunities for development, and the challenges faced by the Islamic banking industry. This research uses a qualitative approach through literature study and descriptive analysis based on recent studies and regulations related to Islamic finance and sustainability. The findings show that Islamic banking has strong compatibility with green finance principles due to its real-sector orientation, risk-sharing mechanism, and ethical values that support sustainability. The implementation of *Green Islamic Finance* requires restructuring financing portfolios, developing green financial products, and strengthening ESG-based operations. Indonesia also has significant potential to become a center for *Green Islamic Finance* because of its large Islamic finance market, high demand for green investment, and supportive regulations. However, several challenges remain, including limited industrial capacity, human resource readiness, and low public literacy regarding sustainable finance. Therefore, *Green Islamic Finance* has the potential to support a more equitable and sustainable economic development.

Keywords: *Green Islamic Finance*, Islamic banking, green economy, sustainable finance, ESG

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global telah berkembang dari isu sektoral menjadi persoalan pembangunan yang memengaruhi hampir seluruh negara (Sun et al., 2022). Kenaikan suhu bumi, pencemaran air, kerusakan ekosistem, serta meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang semakin besar (IPBES, 2023). Laporan *State of Finance for Nature* juga menunjukkan bahwa aliran pendanaan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan masih sangat tinggi hingga mencapai triliunan dolar per tahun (Canopy et al., 2023). Di sisi lain, World Bank (2024) menegaskan bahwa perubahan iklim dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan apabila tidak direspons melalui kebijakan lintas sektor. Dari sini tampak bahwa persoalan lingkungan tidak lagi hanya berkaitan dengan konservasi alam, tetapi telah menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan ekonomi global (World Bank, 2024b). Karena itu, kebutuhan terhadap model pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan semakin mendesak.

Selama beberapa dekade, sistem ekonomi konvensional bertumpu pada pertumbuhan output, ekspansi konsumsi, dan eksploitasi sumber daya secara intensif (Hasid et al., 2022). Pendekatan tersebut memang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal, tetapi sering mengabaikan dampak eksternal berupa kerusakan lingkungan dan ketimpangan distribusi kesejahteraan. Pola produksi dan konsumsi yang tidak efisien terbukti meningkatkan tekanan terhadap energi, pangan, dan daya dukung lingkungan (Kumar & Isha, 2023). Selain itu, ukuran keberhasilan ekonomi yang terlalu berfokus pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai belum mampu menggambarkan kualitas kesejahteraan sosial maupun keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh (Stavytsky & Dligach, 2025). Menariknya, sektor bisnis kini mulai melihat perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan risiko finansial yang dapat memengaruhi investasi, rantai pasok, dan profitabilitas perusahaan. Karena itu, diperlukan

paradigma ekonomi baru yang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, sektor keuangan memiliki posisi strategis karena menentukan arah aliran modal dan pembiayaan pembangunan. Bank, pasar modal, dan lembaga pembiayaan memiliki peran besar dalam menentukan sektor ekonomi mana yang berkembang lebih cepat. Ketika pembiayaan lebih banyak diarahkan pada sektor tinggi emisi, maka struktur ekonomi cenderung mengikuti pola tersebut (Green Finance Institute Indonesia, 2025; Performance et al., 2026). Sebaliknya, apabila pembiayaan difokuskan pada energi terbarukan, transportasi rendah karbon, dan usaha berkelanjutan, maka transformasi ekonomi hijau dapat berlangsung lebih cepat (Ahmad et al., 2026). Menurut berbagai studi terbaru, integrasi risiko iklim ke dalam sistem keuangan menjadi penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi karena perubahan iklim dapat memengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesehatan sektor perbankan (Andrieș, 2026; Shirai, 2025). Dari sini tampak bahwa lembaga keuangan tidak lagi dipandang hanya sebagai perantara netral, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menentukan arah pembangunan ekonomi.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, konsep *green finance* berkembang luas dalam kebijakan ekonomi global. Green finance merujuk pada aktivitas pembiayaan dan investasi yang mendukung perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, efisiensi sumber daya, dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Berbagai instrumen seperti *green bond*, *green loan*, *sustainability linked financing*, dan *green taxonomy* mulai dikembangkan dalam praktik keuangan modern (Cicchiello & Perdichizzi, 2026). Inovasi tersebut berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan proyek hijau dan menurunkan hambatan investasi transisi energi (Zaporozhets et al., 2026). Di sisi lain, kebutuhan investasi hijau global masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pembiayaan yang tersedia saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa green finance tidak lagi dipandang

sebagai tren pasar semata, melainkan telah menjadi bagian penting dalam arsitektur sistem keuangan global (Nisamudheen & Shareef, 2026).

Dalam perkembangan tersebut, perbankan syariah memiliki prinsip yang selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Larangan riba, gharar, dan maysir mendorong aktivitas ekonomi berbasis aset riil serta menghindari spekulasi berlebihan. Selain itu, nilai keadilan, kemaslahatan, dan pembagian risiko menjadi dasar penting dalam pembiayaan yang lebih etis dan berkelanjutan (Wang et al., 2023).

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung agenda *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Hadi et al., 2025). Sejalan dengan itu, Bartkowiak dkk. (2024) menegaskan adanya keterkaitan antara prinsip ekonomi Islam dan konsep keuangan berkelanjutan. Perspektif Islam mengenai lingkungan melalui konsep khalifah dan amanah juga menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan sosial dan ekologis. Karena itu, integrasi antara green finance dan Islamic finance melahirkan pendekatan *Green Islamic Finance* yang semakin relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan Green Islamic Finance karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar dan pasar keuangan syariah yang terus berkembang (Fitryansyah, 2024; International Monetary Fund, 2023). Selain itu, kebutuhan pembiayaan untuk transisi energi, pembangunan infrastruktur hijau, pertanian berkelanjutan, dan rehabilitasi lingkungan juga sangat besar. Otoritas Jasa Keuangan melalui *Taxonomy for Sustainable Finance Indonesia* terus mendorong penguatan sistem pembiayaan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Namun demikian, implementasi perbankan syariah hijau masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi ESG, dominasi pembiayaan konsumtif, serta harmonisasi standar syariah dan keberlanjutan yang masih berkembang

(Satyro et al., 2022). Di sisi lain, kajian mengenai Green Islamic Finance masih lebih banyak membahas sukuk hijau atau hubungan umum antara maqashid syariah dan sustainability. Penelitian yang secara khusus membahas strategi operasional perbankan syariah dalam mendukung ekonomi hijau, terutama dalam konteks Indonesia, masih relatif terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi perbankan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui perspektif Green Islamic Finance dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis deskriptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) guna mengeksplorasi konstruksi teoretis dan konseptual *Green Islamic Finance* pada industri perbankan syariah. Melalui metode ini, fokus utama diarahkan pada interpretasi mendalam terhadap berbagai temuan ilmiah, regulasi, dan diskursus terkini tanpa melibatkan pengukuran variabel secara statistik. Data dihimpun secara sistematis dari sumber-sumber otoritatif seperti artikel jurnal bereputasi (Scopus, ScienceDirect, Springer, Taylor & Francis), buku akademik, serta laporan resmi dari institusi global dan nasional seperti World Bank, IMF, OJK, dan Bank Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci strategis seperti *green banking*, *sustainable development*, dan *maqashid syariah*, dengan memprioritaskan publikasi lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan dinamika pembahasan yang mutakhir.

Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif yang meliputi tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi makna guna membangun sintesis gagasan yang komprehensif. Literatur yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam tema-tema krusial, mulai dari landasan filosofis syariah hingga tantangan implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan di lapangan. Peneliti membandingkan berbagai perspektif untuk memetakan pola argumen serta menemukan celah strategis perbankan

syariah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau melalui instrumen pembiayaan yang etis. Seluruh argumentasi disusun secara naratif, runtut, dan kritis dengan tetap menjaga ketelitian akademik melalui verifikasi sumber data, sehingga mampu menawarkan arah strategi yang jelas bagi pengembangan ekosistem keuangan syariah berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Strategis Perbankan Syariah dalam Green Finance

Perkembangan *green finance* mendorong sektor keuangan tidak lagi hanya berfungsi sebagai perantara dana, tetapi juga sebagai penentu arah pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, perbankan memiliki peran penting dalam mengarahkan pembiayaan ke sektor yang mendukung transisi ekonomi hijau. (World Bank, 2024b) menjelaskan bahwa integrasi risiko iklim ke dalam sistem keuangan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Karena itu, arah alokasi pembiayaan akan sangat memengaruhi struktur ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Di tengah perkembangan tersebut, perbankan syariah memiliki posisi yang cukup strategis karena prinsip dasarnya selaras dengan nilai keberlanjutan. Larangan riba, gharar, dan maysir membatasi aktivitas spekulatif dan mendorong keterkaitan langsung dengan sektor riil. Selain itu, nilai keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) menjadikan pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan (Wang et al., 2023). Dari sini tampak bahwa konsep Green Islamic Finance memiliki landasan yang kuat baik secara normatif maupun operasional.

Secara praktik, akad seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah berpotensi mendukung pembiayaan sektor produktif seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur hijau. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena sebagian besar

portofolio pembiayaan syariah masih didominasi sektor konsumtif jangka pendek. Oleh sebab itu, penguatan green Islamic finance membutuhkan reorientasi portofolio, inovasi produk, dan penguatan kebijakan keberlanjutan dalam industri perbankan syariah.

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah (<i>Green Islamic Finance</i>)
Orientasi utama	Profit maksimal	Profit dan kemaslahatan
Dasar transaksi	Bunga (<i>interest-based</i>)	Akad berbasis aset riil
Hubungan dengan sektor riil	Tidak selalu langsung	Sangat kuat
Screening pembiayaan	Finansial	Finansial, syariah, dan ESG
Risiko spekulasi	Relatif tinggi	Lebih terbatas
Relevansi dengan green finance	Adaptif	Selaras secara prinsip

Gambar 1. Perbandingan Karakteristik Bank

Secara konseptual, tabel tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kesesuaian yang lebih dekat dengan prinsip green finance dibandingkan sistem keuangan konvensional. Meski demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal tanpa dukungan strategi kelembagaan, inovasi produk, dan penguatan regulasi keberlanjutan.

2. Strategi Implementasi *Green Islamic Finance* pada Bank Syariah

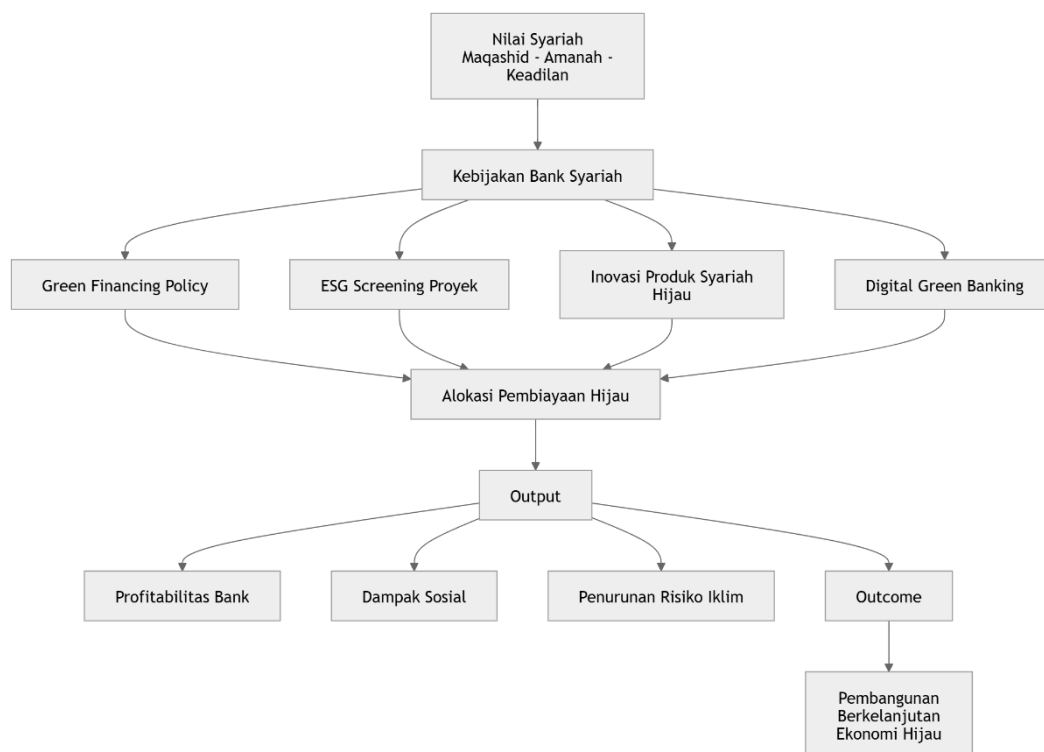
Implementasi *Green Islamic Finance* pada perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan penambahan produk keuangan hijau, tetapi juga menyangkut perubahan arah kebijakan pembiayaan dan strategi bisnis bank secara menyeluruh. Dalam konsep *green banking*, lembaga keuangan dituntut untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses pembiayaan, manajemen risiko, hingga operasional internal bank (UNEP FI, 2023). Karena

itu, transformasi menuju perbankan syariah hijau memerlukan penyesuaian kebijakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Langkah utama yang dapat dilakukan adalah restrukturisasi portofolio pembiayaan. Selama ini, pembiayaan bank syariah masih banyak terkonsentrasi pada sektor konsumtif dan perdagangan jangka pendek. Padahal, sektor seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah membutuhkan dukungan pembiayaan jangka panjang yang stabil. (World Bank, 2024) menjelaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon sangat bergantung pada kemampuan sektor keuangan dalam mengalihkan aliran modal menuju sektor berkelanjutan. Dari sini tampak bahwa arah pembiayaan bank syariah akan sangat menentukan kontribusinya terhadap pembangunan hijau.

Selain restrukturisasi portofolio, inovasi produk juga menjadi bagian penting dalam implementasi Green Islamic Finance. Bank syariah dapat mengembangkan berbagai produk seperti pembiayaan panel surya, kendaraan listrik berbasis syariah, pembiayaan UMKM ramah lingkungan, hingga *green sukuk* untuk proyek infrastruktur hijau. Islamic Development Bank (2023) menyebutkan bahwa instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Dengan demikian, inovasi produk tidak hanya memperluas pasar perbankan syariah, tetapi juga memperkuat kontribusinya terhadap agenda keberlanjutan global.

Transformasi juga perlu dilakukan pada aspek operasional internal bank. Digitalisasi layanan, pengurangan penggunaan kertas, efisiensi energi gedung, dan penerapan pelaporan ESG menjadi bagian penting dalam praktik *green banking*. Otoritas Jasa Keuangan (2025) menegaskan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan harus mencakup seluruh aktivitas lembaga jasa keuangan, bukan hanya pada produk pembiayaan. Karena itu, bank syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan hijau, tetapi juga menjadi



Secara konseptual, strategi tersebut menunjukkan bahwa Green Islamic Finance merupakan integrasi antara nilai syariah, kebijakan kelembagaan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nilai maqashid al-shariah menjadi dasar etis, sementara kebijakan pembiayaan dan operasional bank menjadi instrumen implementasi dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

3. Peluang Indonesia sebagai Pusat *Green Islamic Finance*

Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat *Green Islamic Finance* karena didukung oleh pasar keuangan syariah yang luas, kebutuhan pembiayaan hijau yang tinggi, serta dukungan regulasi yang terus berkembang. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki basis yang kuat bagi pertumbuhan layanan keuangan syariah. Di sisi lain, agenda transisi energi dan pembangunan rendah karbon

Gambar 2. Diagram Model Strategi Impleme

membutuhkan pembiayaan jangka panjang dalam skala besar. World Bank (2024) menegaskan bahwa negara berkembang membutuhkan mobilisasi

modal yang lebih luas untuk mendukung agenda iklim global. Dalam konteks tersebut, perbankan syariah Indonesia memiliki peluang strategis untuk berperan dalam pembiayaan ekonomi hijau. Dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melalui penguatan keuangan berkelanjutan, *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia*, serta penerbitan *green sukuk* semakin memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan *Green Islamic Finance* (OJK, 2025).

Peluang lainnya berasal dari pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital. Banyak UMKM Indonesia bergerak pada sektor yang berkaitan dengan ekonomi hijau seperti pertanian berkelanjutan, pengolahan limbah, dan industri kreatif ramah lingkungan. OECD (2023) menjelaskan bahwa transisi menuju ekonomi hijau akan lebih inklusif apabila melibatkan usaha kecil dan menengah sebagai bagian penting ekosistem ekonomi. Karena itu, Green Islamic Finance di Indonesia tidak hanya berfokus pada proyek besar, tetapi juga dapat berkembang melalui penguatan ekonomi masyarakat.



Gambar 3. Framework Peluang Indonesia

Framework tersebut menunjukkan bahwa peluang Indonesia dalam pengembangan Green Islamic Finance terbentuk dari integrasi antara kekuatan pasar syariah, dukungan regulasi, dan kebutuhan pembiayaan hijau

nasional. Seluruh faktor tersebut kemudian mendorong implementasi pembiayaan berkelanjutan yang diarahkan pada pembangunan ekonomi rendah karbon dan penguatan ekonomi masyarakat.

4. Tantangan Implementasi dan Hambatan Industri

Meskipun *Green Islamic Finance* memiliki prospek yang besar, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama terletak pada skala industri perbankan syariah yang relatif lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Kondisi ini memengaruhi kapasitas pembiayaan, terutama untuk proyek hijau yang umumnya membutuhkan dana besar dan jangka waktu panjang. Islamic Financial Services Board (2024) menjelaskan bahwa kekuatan kelembagaan dan kapasitas modal menjadi faktor penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Karena itu, penguatan industri dan konsolidasi perbankan syariah masih menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan *green financing* (Board, 2024).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan literasi ESG dalam industri perbankan syariah. Sebagian besar lembaga keuangan syariah masih lebih fokus pada aspek kepatuhan syariah, sementara kemampuan teknis seperti penilaian risiko iklim, *carbon accounting*, dan evaluasi taksonomi hijau masih terbatas. Padahal, implementasi *green finance* membutuhkan kemampuan analisis yang menggabungkan aspek keuangan, lingkungan, dan kebijakan publik. United Nations Environment Programme (2023) menegaskan bahwa transisi menuju keuangan berkelanjutan membutuhkan peningkatan kapasitas institusi dan SDM secara sistematis. Dari sini tampak bahwa pengembangan kompetensi menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Green Islamic Finance (UNEP, 2023).

Selain itu, tantangan juga muncul dari sisi pasar dan perilaku nasabah. Sebagian pelaku usaha masih memandang proyek hijau sebagai beban biaya tambahan, bukan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat

ekonomi dan lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berkelanjutan juga masih berkembang, sehingga permintaan pasar belum sepenuhnya optimal. Dalam kondisi tersebut, bank syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai agen edukasi dalam membangun ekosistem ekonomi hijau yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5. Model Integratif *Green Islamic Finance*

Berdasarkan sintesis literatur, *Green Islamic Finance* dapat dipahami sebagai model integratif yang menghubungkan nilai syariah, tata kelola kelembagaan, dan tujuan keberlanjutan dalam satu kerangka yang saling berkaitan. Nilai seperti maqashid al-shariah, amanah, keadilan, dan tanggung jawab ekologis menjadi dasar etis dalam pembiayaan syariah. Sementara itu, aspek kelembagaan mencakup tata kelola, manajemen risiko, inovasi produk, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan berkelanjutan. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk menghasilkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Dari sini tampak bahwa *Green Islamic Finance* bukan hanya pengembangan produk hijau, tetapi juga perubahan paradigma dalam fungsi perbankan syariah.

Dalam implementasinya, bank syariah perlu memperluas indikator kinerja yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada aspek keberlanjutan. Indikator tersebut dapat berupa volume pembiayaan hijau, kontribusi pengurangan emisi karbon, tingkat inklusi UMKM hijau, dan dampak sosial pembiayaan. International Monetary Fund (2024) menegaskan bahwa *impact measurement* menjadi bagian penting dalam sistem keuangan berkelanjutan modern. Karena itu, bank syariah membutuhkan sistem pelaporan keberlanjutan yang lebih transparan, terukur, dan dapat dievaluasi secara independen.

Jika diterapkan secara konsisten, model integratif ini berpotensi memperkuat posisi perbankan syariah sebagai agen transformasi ekonomi berkelanjutan. Keberhasilan implementasinya tidak hanya diukur dari jumlah

produk hijau yang tersedia, tetapi juga dari perubahan arah pembiayaan dan dampak nyata terhadap lingkungan serta masyarakat.

6. Implikasi Kebijakan dan Arah Pengembangan Masa Depan

Pengembangan *Green Islamic Finance* membutuhkan dukungan kebijakan yang terintegrasi antara regulator, otoritas moneter, dan industri keuangan. Selama ini, kebijakan keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan masih berjalan secara terpisah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi melalui penyusunan peta jalan khusus *Green Islamic Finance* yang mencakup target, insentif, dan standar pelaporan yang jelas. OECD menegaskan bahwa kepastian regulasi menjadi faktor penting dalam mendorong investasi jangka panjang pada sektor berkelanjutan. Dalam konteks ini, regulator memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi industri keuangan syariah hijau.

Di sisi lain, perbankan syariah perlu memperkuat inovasi produk dan kolaborasi lintas sektor. Pembiayaan hijau memiliki risiko dan kebutuhan modal yang cukup besar, sehingga diperlukan kerja sama dengan pemerintah, fintech, investor institusional, dan lembaga penjamin. Pendekatan *blended finance* dapat menjadi solusi untuk memperluas skala pembiayaan sekaligus membagi risiko secara lebih seimbang.

Dalam bidang akademik, penelitian lanjutan masih sangat terbuka untuk dikembangkan, terutama terkait pengaruh pembiayaan hijau terhadap profitabilitas, risiko kredit, reputasi bank, dan loyalitas nasabah. Selain itu, studi komparatif antara Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah juga dapat memperkaya pengembangan teori maupun praktik *Green Islamic Finance* di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Green Islamic Finance* merupakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan pembangunan berkelanjutan. Perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung ekonomi hijau karena sistem

pembiayaannya berbasis sektor riil, pembagian risiko, serta nilai etika yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dalam implementasinya, pengembangan *Green Islamic Finance* memerlukan restrukturisasi portofolio pembiayaan, inovasi produk hijau, serta penguatan operasional berbasis prinsip ESG agar dampak pembiayaan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan *Green Islamic Finance* karena didukung oleh pasar keuangan syariah yang luas, kebutuhan investasi hijau yang tinggi, serta regulasi yang semakin berkembang. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas industri, kesiapan sumber daya manusia, dan rendahnya literasi pasar terhadap pembiayaan berkelanjutan. Karena itu, penguatan kolaborasi antara regulator, industri keuangan, akademisi, dan masyarakat menjadi langkah penting dalam mendorong pengembangan *Green Islamic Finance* sebagai model pembangunan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., Boumaiza, A., Yazici, M., Taşaltın, N., & Özmen, S. (2026). From Global Mapping to Local Action: Green Finance, Regulatory Frameworks, and Policy Transformation for Sustainable Energy Transition in Qatar and Türkiye. *Sustainable Development*, 34(2), 1648–1684. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/sd.70373>
- Andrieş, A. M. (2026). Climate-Related Financial Policy and Systemic Risk. *Journal of Economic Surveys*. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6145687>
- Bartkowiak, A., Lemanowicz, J., Rydlewska, M., & Sowiński, P. (2024). The impact of proximity to road traffic on heavy metal accumulation and enzyme activity in urban soils and dandelion. *Sustainability*, 16(2), 812. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su16020812>

Board, I. F. S. (2024). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*.
<https://www.ifsb.org>

Canopy, G., Olsen, N., Mulder, I., Hang, Q., Malandrino, G. M., Blin, A., Mitchell, A., Wong, P. C., Ederer, W., & Bisom, N. (2023). State of Finance for Nature 2023: The Big Nature Turnaround-Repurposing \$7 Trillion to Combat Nature Loss. *United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030*.

Cicchello, A. F., & Perdichizzi, S. (2026). Introduction to Green Finance and Sustainable Financing. In *The Role of Green Bonds in Finance: Towards a Sustainable Future* (pp. 1–23). Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-032-14840-7_1

Fitryansyah, M. A. (2024). *Philosophy Of Islamic Education : An Analysis Of Nomenclature Disputes Through Historical , Anagogical , And Philosophical Perspectives*. 74–87.

Green Finance Institute Indonesia. (2025). *Sustainable Finance for Indonesia's Low-Carbon Transition*. <https://www.greenfinanceinstitute.com/wp-content/uploads/2025/12/SFC-Whitepaper-English-Indonesian.pdf>

Hadi, A., Yunani, A., Swandari, F., Hayat, A., & Maharani, D. (2025). Integrating ESG into Islamic investment: A scoping review of challenges and opportunities. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 5(02), 879–905.
<https://doi.org/https://doi.org/10.63922/ajmesc.v5i02.1345>

Hasid, H. Z., Se, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). (2023). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES Secretariat. <https://ipbes.net/global-assessment>

- International Monetary Fund. (2023). *Global Financial Stability Report: Financial and Climate Policies for a High-Interest-Rate Era*.
<https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2023/october/english/ch3.pdf>
- Kumar, N., & Isha, A. (2023). Responsible consumption and production : a roadmap to sustainable development. *Environmental Sustainability*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.1007/s42398-023-00266-9>
- Nisamudheen, P. P., & Shareef, K. H. (2026). Assessing the role of green finance in fostering renewable energy transition and sustainable development in India. *Discover Environment*, 4(1), 62. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s44274-025-00427-z>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II (2025--2029)*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan/>
- Performance, C., Pratama, S. M., & Info, A. (2026). *JOURNAL OF ACCOUNTING*. 2(1), 15–26.
- Satyro, W. C., de Almeida, C. M. V. B., Pinto Jr Jr, M. J. A., Contador, J. C., Giannetti, B. F., de Lima, A. F., & Fragomeni, M. A. (2022). Industry 4.0 implementation: The relevance of sustainability and the potential social impact in a developing country. *Journal of Cleaner Production*, 337, 130456.
- Shirai, S. (2025). Climate risk and central banking in Asia: balancing price stability and financial stability. In *Journal of International Money and Finance* (p. 103491). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2025.103491>
- Stavytskyy, A., & Dligach, A. (2025). The Global Economic Model in Crisis: An Analysis of the Obstacles to the Sustainable Development Goals.

Sustainability, 17(19), 8537.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su17198537>

Sun, J., Jin, H., Tsai, F., & Jakovljevic, M. (2022). *A Global Assessment of Sustainable Development: Integrating Socioeconomic, Resource and Environmental Dimensions The Concept of Sustainable Development*. 10(February), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.816714>

United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). *Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, Healthy People*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108627146>

United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2023). *Principles for Responsible Banking: Guidance for Climate-Aligned Banking*. <https://www.unepfi.org/publications/principles-for-responsible-banking/>

Wang, Y., Liu, C., Zhang, X., & Zeng, S. (2023). Research on sustainable furniture design based on waste textiles recycling. *Sustainability*, 15(4), 3601. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15043601>

World Bank. (2024a). *Finance for Climate Action and Sustainable Development*. <https://www.worldbank.org/en/topic/climatefinance>

World Bank. (2024b). *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet>

Zaporozhets, A., Khaustova, V., Kyzym, M., & Trushkina, N. (2026). Sustainable Financing Mechanism for Energy System Development Toward a Decarbonized Economy: Conceptual Model Framework. *Energies*, 19(2), 422. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/en1902042>